

ISSN : 1907 - 9184

Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

SINAR MAS

VOLUME III, NO 1, November 2011



Partai Politik Sebagai Inpra Struktur
Organisasi Dalam Sistem
Politik Indonesia

Perlindungan Korban Kejahatan
Dalam Peraturan Hukum Pidana
Indonesia

Optimalisasi Fungsi PNS Menuju
Tabanan Serasi

Pengembangan Kewirausahaan
Sekolah

Perguruan Tinggi Pegang Kendali
Budayakan Kewirausahaan

Komunikasi Efektif Dalam
Aktivitas Publik Speaking

Peranan Politik Perempuan
Di Indonesia
Peluang Dan Hambatan

Pembangunan Ekonomi Global

Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
(STISIP) Margarana Tabanan

II. A. 1. 1. 3. 9

ISSN 1907 - 9184

SINAR MAS

Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
VOLUME 3, NO. 1, NOPEMBER 2011

SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
(STISIP) MARGARANA - TABANAN
2011

DAFTAR ISI

PENGANTAR REDAKSI	i
SUSUNAN REDAKSI	iii
DAFTAR ISI	iv
PARTAI POLITIK SEBAGAI INFRA STRUKTUR ORGANISASI DALAM SISTEM POLITIK INDONESIA Oleh Drs. I Wayan Madra Suartana, M.Si.	1-10
PERLINDUNGAN KORBAN KEJAHATAN DALAM PERATURAN HUKUM PIDANA INDONESIA Oleh I Gst Ngurah Agung Bgs Widiana, SH.,MH	11-17
OPTIMALISASI FUNGSI PNS MENUJU TABANAN SERASI Oleh Drs. I Made Yasa, ATD, MM,	18-22
PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN SEKOLAH Oleh Drs. I Wayan Suwira, M.Si, M.Pd,	23-27
TRANSFORMASI KEPEMIMPINAN ABAD 21 Oleh Drs. I Made Murdika, M.Si,	28-31
PERGURUAN TINGGI PEGANG KENDALI BUDAYAKAN KEWIRAUSAHAAN Oleh I Made Nuryata, S.Pd, M.Pd,	32-37
KOMUNIKASI EFEKTIF DALAM AKTIVITAS PUBLIC SPEAKING Oleh I Dewa Ayu Hendrawathy Putri, S.Sos, M.Si,	38-47
PERANAN POLITIK PEREMPUAN DI INDONESIA PELUANG DAN HAMBATAN Oleh Luh Putu Sridanti, SH, MM,	48-52
PEMBANGUNAN EKONOMI GLOBAL Oleh A. A. Nym. Sri Wahyuni, SE, M.Si,	53-59
PERJUANGAN POLITIK IDENTITAS MENJAGA KEBERTAHANAN BUDAYA DAN DESA PAKRAMAN DI BALI (Studi Kasus di Desa Adat Kuta) Oleh Dr. Drs. Ketut Sumadi, M.Par	60-72
PENGARUH MOTIVASI KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) BALAI KONSERVASI TUMBUHAN KEBUN RAYA "EKA KARYA" BALI-LIPI Oleh Ni Kadek Anggeriani (Mahasiswa STISIP diwisuda tahun 2011 saat ini)	73-76

PERJUANGAN POLITIK IDENTITAS MENJAGA KEBERTAHANAN BUDAYA DAN DESA PAKRAMAN DI BALI (Studi Kasus di Desa Adat Kuta)

Oleh Dr. Drs. Ketut Sumadi, M.Par

ABSTRACT

Political struggle to maintain the viability of cultural identity and village pakraman in Bali, the most important note is the existence of culture, the desa pakraman, and Hinduism in Bali can not be separated from each other. Particularly if associated with Bali as a tourism destination that remains to develop cultural tourism, the direction of development policy in the field of politics must side with efforts to maintain the culture, the desa pakraman, and Hinduism in Bali. If the three main pillars supporting the identity of Bali is not got a political policy, then slowly the culture, the desa pakraman and Hinduism in Bali into the abyss of destruction. Phenomena in the direction of destruction that are now beginning to appear in Bali can be seen from the growing number of migrants from outside, living in rural village areas desa pakraman well as traders, construction workers, or as occupants of new residential lots. Implementation of the philosophy of Tri Hita Karana is further away from expectations. Therefore, it is very important to the future attention of the rulers in politics is to generate and maintain political power which civilized morality and religious morality. Desa Adat Kuta has developed into an international tourism destination, could be one example of the success of village-level leaders to build political policies that favor awake cultural identity, desa pakraman, and Hinduism.

Keywords : Politics, identity, culture, village pakraman

I. PENDAHULUAN

Sebagai daerah pariwisata, Bali tidak bisa lepas dari kebijakan politik pemerintah dalam pembangunan kepariwisataan di Indonesia. Dalam Pembangunan kepariwisataan Indonesia, agama dan kebudayaan mengalami redefinisi dan reproduksi untuk mendukung perkembangan pariwisata. Sebagai bagian integral dari pembangunan nasional yang dilaksanakan secara berkelanjutan, hegemoni dan dominasi pariwisata secara tidak langsung telah terkumulasi dalam program-program pengembangan pariwisata yang dikatakan ber tujuan untuk turut mewujudkan peningkatan kemampuan manusia dan masyarakat Indonesia berdasarkan kemampuan nasional. Kepariwisataan Indonesia bertumpu pada keunikan, kekhasan, dan kelokalan, sehingga

menempatkan *kebhinekaan* sebagai suatu yang hakiki, pengembangan pariwisata inheren untuk melestarikan dan memperkuat jati diri bangsa serta lingkungan alam (Ardika: 2001).

Kebudayaan merupakan aset utama kepariwisataan Indonesia, termasuk Bali (Ardika, 2007: 74), karena sifatnya yang unik dan khas. Dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1999-2004, ada dua paragraf yang dengan tegas memberikan arah pembangunan pariwisata, khususnya dalam Bab Sosial dan Budaya, paragraf g dan h sebagai berikut: (g) Menjadikan keserian dan kebudayaan tradisional Indonesia sebagai wahana bagi pengembangan pariwisata nasional dan mempromosikannya ke luar negeri secara konsisten sehingga dapat menjadi wahana yang

utuh dan terpadu; (b) Mengembangkan pariwisata melalui pendekatan sistem yang utuh dan terpadu bersifat interdisiplin dan partisipatoris dengan menggunakan kriteria ekonomi, teknis, ergonomis, sosial budaya, hemat energi, melestarikan alam dan tidak merusak lingkungan.

Dengan adanya kebijakan pemerintah tentang pengembangan kepariwisataan secara nasional dengan memanfaatkan modal budaya masing-masing etnis di Indonesia, maka setiap daerah seperti berlomba memanfaatkan kearifan lokalnya menjadi daya tarik pariwisata. Untuk melegitimasi tindakan itu, pemerintah daerah masing-masing diberi kebebasan untuk membuat peraturan daerah (Perda) guna menyukseskan pengembangan pariwisata. Di Bali misalnya, mobilitas kekuasaan politik menghagemoni agama dan kebudayaan melalui Perda No. 3 Tahun 1974, diperbaharui menjadi Perda No. 3 tahun 1991 tentang Pariwisata Budaya. Pariwisata Budaya adalah jenis kepariwisataan yang dalam perkembangannya menggunakan kebudayaan Daerah Bali yang dijiwai oleh Agama Hindu yang merupakan bagian dari Kebudayaan Nasional sebagai potensi dasar yang dominan, yang di dalamnya tersirat satu cita-cita akan adanya hubungan timbal balik antara Pariwisata dan Kebudayaan sehingga keduanya meningkat secara serasi, selaras, dan seimbang. Penyelenggaraan pariwisata budaya adalah untuk memperkenalkan, mendayagunakan, melestarikan dan meningkatkan mutu objek dan daya tarik wisata, mempertahankan norma-norma dan nilai-nilai kebudayaan agama dan kehidupan alam Bali yang berwawasan lingkungan hidup, mencegah dan meniadakan pengaruh-pengaruh negatif yang dapat ditimbulkan oleh kegiatan kepariwisataan.

Dalam konteks pembangunan pariwisata di Bali, sejalan dengan pemikiran Mulder (1999: 203-205), Abdullah (2006 :9), Picard (2006: 143), agama dan kebudayaan menjadi propaganda politik untuk mengajak masyarakat dapat menerima budaya pariwisata dalam kehidupan sehari-hari. Simbol agama dan kebudayaan tidak hanya sebagai pengarah yang menentukan *code of conduct* dalam suatu masyarakat yang dipatuhi

atau menjadi penunjuk arah dalam praktik yang berhubungan dengan religio-sitas, tetapi menjadi alat politik bagi perjuangan kepentingan, baik bersifat individual, kelompok, institusi, Agama. Praktik agama bisa menjadi bagian dari pengendalian sosial dan identifikasi diri untuk pemosisian individu, kelompok, dan institusi dalam serangkaian transaksi sosial yang dinamis dan kontekstual dengan perkembangan pariwisata. Karena itu, agama dan kebudayaan dipahami dan dipraktikkan tidak hanya sebagai agama dan kebudayaan *generic*, yang merupakan pedoman yang diturunkan, tetapi juga bersifat diferensial, yang dinegosiasikan dalam keseluruhan interaksi sosial dalam budaya pariwisata.

Dari sinilah permasalahan sosial budaya muncul, karena dalam negosiasi dan pengambilan keputusan dalam penerapan peraturan tersebut lebih bersifat *top down* dan mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetapi gagal melahirkan pemerataan. Modal budaya dieksploitasi untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi dari sektor pariwisata yang menjadi primadona. Menurut Tjatera (2007), pertumbuhan ekonomi terjadi sesuai harapan, tetapi hasil ini sebagian besar dinikmati oleh yang memang sudah kuat perekonomiannya, yang lemah tetap lemah, yang miskin tetap miskin dan malahan tidak jarang menjadi bertambah miskin, karena adanya persaingan antara yang kuat dengan yang lemah.

II. PEMBAHASAN

2.1 Konsensus Penguasa Terhadap Masyarakat

Sosiolog Gianfranco Poggi yang sejalan dengan pemikiran Max Weber, seperti dikutip Tilak (2003:72), membedakan kekuasaan sosial menjadi tiga jenis, yaitu kekuasaan politik, kekuasaan ekonomi, kekuasaan normatif atau ideologis. Jadi, dengan pengertian yang luas, kekuasaan merupakan kemampuan manusia yang kritis untuk berbuat sesuatu yang lain dari yang lain dalam hubungannya dengan alam lingkungannya. Dengan kemampuan yang dimiliki itu, Poggi menyebut manusia sebagai *homo potens*.

Sementara Antonio Gramsci (1891 – 1937), seorang Marxis dari Italia terkenal dengan pemikirannya tentang kekuasaan dengan mempertanyakan mengapa dan bagaimana negara modern bisa mendapatkan konsensus atas kekuasaannya terhadap masyarakat. Tilaar (2000: 73) menguraikan, pemikiran Gramsci dipengaruhi oleh teori-teori sosial Sorel dan Benedetto Croce, di mana sistem kekuasaan yang didasarkan atas konsensus yang dilaksanakan oleh negara disebut hegemoni. Berbeda dengan pandangan Marxis ortodok, pandangan hegemoni tidak selamanya merupakan suatu revolusi kelas seperti yang dikemukakan oleh ajaran Marxisme ortodok. Hegemoni menggabungkan kekuatan dan kesepakatan tergantung pada suatu situasi suatu masyarakat, sehingga melahirkan warga masyarakat yang melalui pendisiplinan diri dia menyesuaikan diri dengan norma-norma yang diletakkan oleh negara. Masyarakat tampaknya begitu pasrah, karena mereka melihat ini sebagai jalan terbaik untuk dapat hidup aman di tengah praktek-praktek kehidupan yang telah terstruktur. Kehidupan telah dikuasai oleh kekuasaan negara atau kekuasaan publik yang telah merembes ke wilayah privat. Menurut Gramsci, apa yang dilaksanakan oleh warga negara berdasarkan kepada organisasi-organisasi sosial yang tergantung kepada konsepsi mereka mengenai dunia yang nyata dan pengorganisir praktek tersebut adalah kaum intelektual.

Gramsci membedakan ada dua jenis intelektual dari tatanan masyarakat kapitalis, yaitu **intelektual tradisional** dan **intelektual organik**. Intelektual organik terbagi atas dua kelompok, yaitu intelektual hegemonik dan intelektual kontrahegemonik. Tugas kaum intelektual hegemonik adalah memastikan bahwa pandangan dunia yang sesuai dengan kapitalisme telah diterima oleh semua kelas. Sedangkan di lain pihak, yang kontrahegemonik bertugas memisahkan kaum proletar dari pandangan-pandangan tadi serta mengukuhkan pandangan dunia sosial. Intelektual hegemonik jelas menghasilkan *kompromi* dengan kaum intelektual tradisional. Fenomena kompromi atau rekonsiliasi ini sangat menarik perhatian

Gramsci, serta jika ada anggota masyarakat tidak mau berkompromi maka akan ada represi terhadap kelompok tersebut oleh negara. Dengan jalan disiplin yang ditanamkan lewat lembaga-lembaga sosial seperti sekolah, perguruan tinggi, lembaga agama, dan organisasi sosial kemasyarakatan sehingga disiplin itu bisa dilaksanakan. Karena itulah Gramsci menegaskan, bahwa hegemoni adalah hubungan edukasional (*educational relationship*). Hubungan edukasional inilah yang membentuk *civil society* yang di dalamnya terletak kekuasaan.

Dua prinsip Gramsci yang sangat berpengaruh, seperti dijelaskan Tilaar, adalah perang posisi dan demokratisasi kehidupan sosial. Dalam perang posisi, dapat dilihat bagaimana pentingnya meningkatkan kemampuan dari para anggota dalam kehidupan masyarakat. Dengan peningkatan kemampuan para anggota, maka mereka dapat menentukan tempatnya atau mengubah struktur kehidupan kelas dalam masyarakat menurut pandangan sosialisme Gramsci. Sedangkan dalam proses demokratisasi, hubungan-hubungan dalam masyarakat akan menjadi lebih baik, sehingga dengan pendidikan hubungan-hubungan yang lebih luas dari seseorang akan memungkinkan terciptanya kehidupan yang lebih baik. Pemberdayaan rakyat merupakan syarat bagi perubahan kehidupan rakyat pada umumnya. Karena itu, pendidikan dan pengembangan kebudayaan dapat merupakan langkah-langkah bagi perlawanan suatu hegemoni. Untuk bisa merebut posisi sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan atau pengetahuan masyarakat. Pendapat Foucault tentang pengetahuan dan kekuasaan memang sangat relevan dalam hal perebutan posisi ini. Kekuasaan menciptakan pengetahuan dan pengetahuan serta kekuasaan saling mempengaruhi secara langsung satu dengan yang lain.

2.2 Perjuangan Politik Identitas Menjaga Kebertahanan Budaya dan Desa Pakraman

Perjuangan politik identitas untuk menjaga kebertahanan budaya dan desa pakraman di Bali, yang paling penting diperhatikan adalah

keberadaan budaya, desa *pakraman*, dan Agama Hindu di Bali tidak bisa dilepaskan satu sama lain. Terlebih-lebih jika dikaitkan dengan Bali sebagai destinasi pariwisata yang tetap mengembangkan pariwisata budaya, maka arah kebijakan pembangunan di bidang politik harus berpihak kepada upaya-upaya mempertahankan budaya, desa pakraman, dan Agama Hindu di Bali. Jika tiga pilar utama penyangga identitas Bali ini tidak mendapat kebijakan politis, maka secara perlahan budaya, desa *pakraman*, dan Agama Hindu di Bali memasuki jurang kehancuran. Fenomena-fenomena ke arah kehancuran itu saat ini sudah mulai tampak di Bali yang bisa dilihat dari semakin banyak para pendatang luar Bali tinggal di pedesaan wilayah desa pakraman baik sebagai pedagang, buruh bangunan, atau sebagai penghuni kavling perumahan baru. Implementasi falsafah *Tri Hita Karana* yang menjadi landasan desa pakraman di Bali mulai semakin jauh dari harapan, sehingga pola hidup dan gaya hidup krama desa pakraman di Bali semakin banyak yang tidak sejalan dengan budaya dan tuntunan moral Agama Hindu Bali. Karena itu, yang sangat penting ke depan mendapat perhatian para penguasa dalam berpolitik adalah membangkitkan dan menjaga moralitas kekuasaan politik yang berbudaya dan bermoral agama.

Setiap tapal batas, khususnya tapal batas moral harus tetap dijaga. Dalam aspek-aspek agama yang bersifat religius, seperti pendapat Piliang (2004: 321) semakin kental terjadinya pembauran "hasrat" dan "kesucian" yang disebut "*Pospiritualitas*". Telah tercipta suatu kondisi dimana yang *Ilahiah* ditulari oleh yang duniawi, yang transenden dimasuki oleh yang imanen. Ada pencampuran entitas, ada peleburan esensi, ada juga persimpangsiuran nilai, bertumpangtindihnya hasrat rendah dengan kesucian, perbedaan di antara keduanya menjadi kabur.

Dengan terjadinya fenomena "deteritorialisasi" tersebut, yang sangat penting ke depan mendapat perhatian para penguasa dalam berpolitik adalah membangkitkan dan menjaga moralitas kekuasaan politik. Setiap tapal batas, khususnya tapal batas moral harus tetap dijaga.

Harus disadari, menurut Piliang, bahwa ketika batas-batas moral itu dikendalikan oleh politik, batas-batas moral itu terlindas oleh gejolak hasrat politik yang sarat kepalsuan, kesemuan, tipu daya, atau kekerasan. Dalam perspektif politik pengembangan pariwisata yang dikendalikan oleh sistem ekonomi global, maka batas-batas moral terlindas oleh mesin hasrat kapitalisme yang sarat janji kesenangan, kegairahan, dan ekstasi. Giddens (2002: 76) mengingatkan, politik jalan ketiga dalam masyarakat di mana tradisi dan adapt istiadat kehilangan pegangan, satu-satunya jalan ke arah pembentukan otoritas adalah melalui demokrasi. Individualisme baru tidak serta merta mengikis otoritas, tetapi menuntut agar otoritas ditetapkan secara aktif atau partisipatif.

Wacana keagamaan dan kebudayaan dalam hegemoni kekuasaan politik harus seiring seirama dengan meningkatnya pengendalian batas-batas moral melalui mesin-mesin spiritual dan kultural. Inilah sebuah harapan masa depan yang pantas untuk diperjuangkan, di dalam masyarakat yang terhegemoni kekuasaan yang cenderung terbuai dalam mimpi-mimpi ideologi pasar. Batas-batas moral dalam berpolitik inilah pada akhirnya menjadi benteng penyelamat keberlanjutan budaya, desa pakraman, dan Agama Hindu Bali.

2.3. Studi Kasus di Desa Adat Kuta

Modal budaya sebagai dasar pengembangan pariwisata di Desa Adat Kuta memiliki makna pelestarian modal budaya sebagai wujud perjuangan politik identitas Desa Adat Kuta. Menurut Bendesa Adat Kuta, IGusti Ketut Sudira, karena *krama* Desa Adat Kuta telah menjadikan pariwisata sebagai bagian dari kebudayaannya. Oleh karena itu, pelestarian kebudayaan bisa berjalan seiring dengan pengembangan pariwisata. Hal ini sejalan pula dengan Perda Bali No. 3 Tahun 1974, kemudian diperbaharui menjadi Perda Bali Nomor 3 Tahun 1991, pasal 3, yang menegaskan bahwa tujuan penyelenggaraan pariwisata budaya adalah untuk memperkenalkan, mendayagunakan, melestarikan, dan meningkatkan mutu objek dan daya tarik wisata, mempertahankan norma-norma dan nilai-nilai kebudayaan, agama, dan kehidupan alam Bali yang berwawasan lingkungan hidup.

mencegah dan meniadakan pengaruh-pengaruh negatif yang dapat ditimbulkan oleh kegiatan kepariwisataan.

Menurut Pitana (1999: 22) jauh sebelum Perda tersebut lahir, tepatnya pada bulan Januari 1968, Pemerintah Bali telah mempunyai pemikiran tentang konsep pariwisata budaya yang tercetus dalam musyawarah kerja pariwisata daerah Bali. Musyawarah kerja pariwisata ini berhasil memutuskan bahwa pariwisata Bali harus dapat dikembangkan dengan selalu berpangkal pada kehidupan kebudayaannya yang bersumber pada sifat dan sikap religius umatnya. Pariwisata harus mampu memelihara dan memperkembangkan kebudayaan dalam bentuk mumunya, sehingga menarik bagi wisatawan.

Bulan Oktober 1971, Pemerintah Bali mengadakan seminar Pariwisata Budaya Daerah Bali yang antara lain merekomendasikan tentang pengembangan pariwisata budaya. Rekomendasi ini menegaskan bahwa pengembangan pariwisata tidak boleh mengakibatkan merosotnya nilai-nilai kebudayaan yang merupakan daya tarik pokok bagi wisatawan yang berkunjung ke Bali.

Dengan adanya rekomendasi dan Perda Pariwisata Budaya tersebut, maka tujuan pengembangan pariwisata budaya tersebut, menurut Ardika (2007: 76), dapat diibaratkan sebagai pisau bermata dua. Pariwisata dapat menimbulkan proses komoditisasi terhadap budaya masyarakat lokal karena dianggap sebagai objek dan daya tarik wisata. Sedangkan di sisi lain pariwisata dapat menjaga keberlanjutan Desa Adat Kuta beserta modal budayanya.

Krama Desa Adat Kuta selama ini telah memainkan "pisau bermata dua" seperti dianalogkan oleh Ardika dalam mengubah modal budayanya sejak awal perkembangan pariwisata sampai memasuki era global dewasa ini. Di satu sisi mereka selalu berupaya agar modal budaya yang dimiliki bisa menjadi komoditi dan daya tarik pariwisata, sehingga dalam praktik-praktik budaya itu selalu memperhatikan kepentingan wisatawan dan keberlanjutan pariwisata. Sedangkan di sisi lain, mereka terus mengajak *krama* desa adat untuk melestarikan modal budayanya, sehingga Desa Adat Kuta tidak kehilangan karakter dan jati

diri yang berlandaskan *trihita karana* di tengah berkembangnya pariwisata.

Bendesa adat Kuta, I Gusti Ketut Sudira, bersama krama desa adat seperti I Made Wendra, I Made Sumer, I Made Supatra Karang, dan I Nyoman Bagiana Karang memang mengakui, terdapat hubungan secara timbal balik antara upaya pelestarian budaya dengan pengembangan pariwisata di Desa Adat Kuta. Keunikan budaya bernafaskan Agama Hindu yang diwarisi dari leluhur patut dilestarikan dan dijaga di tengah pengembangan pariwisata agar tercipta kehidupan yang seimbang antara spiritual dengan material. Lebih jauh mereka menjelaskan (Wawancara tanggal, 20 April 2009) sebagai berikut.

"Kami selalu menjaga antara kepentingan-kepentingan desa adat dengan kepentingan pemerintah dan kepentingan pengusaha pariwisata. Kami bersama-sama telah berkead menjaga budaya dan jati diri desa adat yang berlandaskan *tri hita karana* dalam pengembangan pariwisata. Kami bisa membedakan dan memilah kepentingan religius yang harus kami pertahankan dan yang mana boleh dirubah mengikuti perkembangan zaman dalam kehidupan sehari-hari, dan yang mata kegiatan budaya yang boleh ditonton wisatawan. Pendapatan dari pariwisata sangat penting bagi kami untuk mendanai kegiatan pelestarian budaya, melaksanakan upacara agama, selain untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dari sini kami berharap, budaya Desa Adat Kuta bisa lestari dan pariwisata juga terus berkembang, sehingga tercipta kehidupan yang adil, seimbang antara material dengan spiritual."

Picard (2006: 268-269) menyebut fenomena seperti penjelasan *krama* Desa Adat Kuta di atas dengan istilah kebudayaan sebagai "warisan" dan kebudayaan sebagai "modal" dalam pengembangan pariwisata budaya. Kebudayaan di satu sisi sebagai warisan yang harus dilestarikan dan dijaga dari pengaruh budaya luar, sedangkan di sisi lain kebudayaan Bali dianggap sebagai modal yang dilipatgandakan dalam pengembangan pariwisata. Dalam wacana pariwisata budaya di Bali, kebudayaan Bali selalu dikaitkan dengan tiga unsur yang merupakan tiga lapis yang bertumpang-

tindih satu sama lain, yakni (1) bersumber pada Agama Hindu; (2) mengilhami adat istiadat masyarakat dan menjiwai lembaga adat; (3) menjelma dalam bentuk seni yang bernilai tinggi.

Untuk menjelaskan kaitan ketiga lapis tersebut, maka kebudayaan Bali digambarkan sebagai sebuah pohon, dengan 'agama' sebagai akar, "adat" sebagai pokok, dan "seni" sebagai buah. Kebudayaan sangat berkaitan dengan agama, adat, dan seni sehingga sukar dapat ditembus atau dicemarkan oleh pengaruh budaya luar. Ini berarti, kebudayaan bagi orang Bali adalah warisan yang didapat dari leluhur dan sebagai nilai yang harus dipertahankan, dipelihara, serta dibina. Sejak kedatangan wisatawan, maka kebudayaan Bali telah menjadi "modal" dalam pengembangan pariwisata. Kebudayaan Bali memiliki nilai yang harus dimanfaatkan, dipasarkan, dan dipromosikan di pasaran pariwisata internasional. Karena itu, jika mau menjual buah-buah seni budaya Bali, janganlah pokok pohonnya dirobokkan, sebaliknya harus dirawat dan dijaga supaya akarnya kuat serta diairi dengan baik. Pendapatan dari pariwisatalah yang dianggap mampu membina, memelihara, dan melestarikan kebudayaan Bali.

Pelestarian budaya yang dilakukan *krama* Desa Adat Kuta, tampaknya juga sejalan dengan hasil penelitian McKean (1973) dan Noronha (1979) tentang kepariwisataan di Bali. Data hasil penelitiannya ternyata masih meyakinkan validitasnya, di mana pariwisata bukan merusak Bali, tetapi malahan memperkuat ikatan orang-orang Bali pada budayanya. Fenomena ini disebutkan dengan istilah "involusi budaya" (*cultural involution*), maksudnya adalah bahwa dalam pengembangan pariwisata, orang-orang Bali ingin menjadi modern sambil melestarikan tradisi budayanya, dan untuk itu mereka memerlukan uang dari kunjungan para wisatawan. Terdorong sekaligus oleh alasan pelestarian budaya dan kebutuhan ekonomi, akhirnya orang Bali membina tradisinya sekaligus demi mendapatkan uang untuk modernisasinya. Lebih jauh pendapat McKean dan Noronha (dalam Picard, 2006: 175-178) dapat diringkas sebagai berikut.

"Pemeliharaan martabat Bali melalui "penyajian budaya" agaknya merupakan salah satu faktor penting dalam mempertahankan Bali sebagai kesatuan kultural yang unik. Dengan menyajikan kebudayaan mereka kepada wisatawan, orang-orang Bali dipertajam jati dirinya, juga diperkuat posisinya dalam tataran nasional. Yang terjadi dalam pengembangan pariwisata budaya di Bali adalah penambahan nilai-nilai budaya dengan nilai-nilai ekonomi dan penambahan penonton pribumi dengan penonton asing. Penambahan ini dipandang sebagai proses revitalisasi. Orang-orang Bali telah belajar bagaimana membedakan pertunjukkan budaya menurut publik yang ditujunya, sehingga makna pertunjukkan budaya Bali tidak mudah tersentuh oleh pergelarangannya di hadapan wisatawan. Pendapatan yang diperoleh dari pariwisata kemudian disalurkan kembali untuk memperkuat ikatan lahir dan bathin yang merupakan sumber kekuatan orang Bali. Pariwisata telah memperkuat ikatan-ikatan pokok yang mengaitkan masa lalu, masa sekarang, dan masa depan, serta membentuk batas yang tidak bisa dilintasi oleh orang luar".

Dengan memiliki orientasi hidup yang berkaitan dengan masa lalu, masa sekarang, dan masa depan, maka *krama* Desa Adat Kuta selalu tertantang untuk kreatif serta melakukan perubahan modal budaya dalam menyikapi perkembangan pariwisata global yang menggandeng ideologi pasar. *Event* Kuta Karnival, pawai *Ogoh-ogoh* memeriahkan upacara *Pangrupukan* menjelang *Nyepi*, tradisi *Majalangu* kegiatan *Ngelawang* pada hari raya *Galungan* dan *Kuningan*, atau penataan pelaksanaan prosesi ritual *melasti* di pantai agar wisatawan dapat menontonnya dengan baik, merupakan beberapa contoh yang mudah dilihat sebagai wujud pelestarian modal budaya yang bergandengan dengan ideologi pasar.

Dengan melibatkan seluruh *stakeholder* yakni masyarakat, pemerintah, dan pengusaha (*society, state, market*), menurut I Made Supatra Karang yang menggagas *event* Kuta Karnival pascatragedi bom tanggal 12 Oktober 2002, kegiatan pelestarian budaya tersebut juga

merupakan salah satu wujud *yadnya*. Sebab praktik-praktik budaya itu tidak menyimpang dari hakekat *yadnya*, yakni pengorbanan atau usaha yang dilakukan dengan hati suci untuk mencapai kesejahteraan hidup bersama dan kebahagiaan lahir batin. Oleh karena itu, makna pelestarian budaya dalam perubahan modal budaya di Desa Adat Kuta, bukan pelestarian dalam arti statis, pasif, atau kembali ke bentuk masa lalu, akan tetapi pelestarian dalam arti sebagai suatu proses dinamis, yakni adanya dekonstruksi yang melahirkan bentuk praktik-praktik budaya baru, adanya proses revitalisasi dan komodifikasi atau penambahan nilai-nilai budaya dengan nilai-nilai ekonomi, dan adanya adaptasi atau penambahan pelaku atau penonton pribumi dengan pelaku atau penonton asing dalam praktik-praktik budaya itu.

Dalam *event* Kuta Karnival misalnya, pelestarian nilai budaya *Tumpek Kandang* dan *Tumpek Bubuh* yakni pemeliharaan dan penghormatan terhadap binatang, tumbuh-tumbuhan dan lingkungan hidup, diwujudkan dalam acara pelepasan burung ke angkasa dan "*Turtle Release*" atau pelepasan tukik (anak penyu) ke laut oleh masyarakat bersama wisatawan, pengusaha pariwisata, dan aparat pemerintah dari kantor Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Provinsi Bali, dan Kabupaten Badung. "*Bonsai Contest*" atau pameran tanaman Bonsai, dan "*Beach Clean*" atau acara bersih-bersih di lingkungan pantai. Acara "*Turtle Release*" seperti tampak pada gambar 7.26 sebagai berikut.

Pelestarian kesenian, seperti seni tari, tubuh, musik, lukis, dan tata busana, diwujudkan dalam acara "*Sunset Dance*", "*Colosal Dance*", "*Tattoo Expo*", "*Suzuki T-shirt Painting Competition*", "*King & Queen Contest*", "*Suzuki Music Festival*". Pelestarian seni permainan tradisional *krama* Desa Adat Kuta dan aktivitas nelayan di laut diwujudkan dalam acara "*Mopantigan Balinese Marital Art*", "*Capturing Suckling Pigs*", "*Snoakers Competition*", "*Surfing Competition*", "*Lifeguard & IPOLA Competition*", "*Fishing Competition*". Untuk melestarikan dan merumuhkan kecintaan terhadap makanan lokal

diwujudkan dalam acara "*Bali Food Festival & Bartender Performance*".

Acara "*Sunset Dance*", "*Tattoo Expo*", "*Capturing Suckling Pigs*", dan "*King & Queen Contest*" menjadi tontonan yang sangat menarik bagi wisatawan. Beberapa wisatawan, seperti Hans dan Rity Tolmie dari Belanda, Ashley dari Australia yang mengikuti acara "*King & Queen Contest*", Paul Loh dari Australia yang mengikuti "*Capturing Suckling Pigs*", dan Decha dari Swedia yang ikut dalam acara "*Tattoo Expo*", mengaku sangat gembira bisa berpartisipasi dalam acara tersebut, karena secara langsung telah melihat sekaligus merasakan uniknya sebagai pelaku dalam praktik budaya di Desa Adat Kuta. Acara "*Tattoo Expo*", "*Capturing Suckling Pigs*", dan Penari *Legong* mengikuti pawai budaya serta "*Sunset Dance*", seperti tampak pada gambar 49 dan 50 sebagai berikut.

Bentuk-bentuk praktik budaya yang baru dalam *event* Kuta Karnival seperti diuraikan dalam data dan tampak pada foto di atas, menunjukkan bahwa betapa besar semangat *krama* desa adat berupaya agar eksistensi modal budayanya bertahan sepanjang zaman. Mereka telah berhasil menghadapi tantangan eksternal berupa budaya pariwisata dan mengatasi berbagai kelemahan internal seperti kurangnya pengetahuan tentang kepariwisataan atau lemahnya kualitas sumber daya manusia, sehingga Desa Adat Kuta tidak mengalami kehancuran akibat desakan budaya luar atau budaya pariwisata, serta juga tidak mengalami kehancuran akibat pembusukan dari dalam tubuh desa adat.

Dengan diserahkannya pengelolaan *event* Kuta Karnival tahun 2008 dari pengusaha pariwisata kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kuta dan Desa Adat Kuta ikut menjadi penanggungjawab dalam struktur kepanitiaan *event* tersebut, maka makna pelestarian budaya dalam perubahan modal budaya juga diartikan sebagai usaha dinamis membangun rasa percaya diri, menggali kekuatan *krama* desa adat di tengah hegemoni pariwisata, dan menciptakan sistem budaya

kebersamaan antara *society, state, dan market*. Hal ini memang sangat sesuai dengan tema Kuta Karnival 2008 yakni “*Menyama Braya (Inspiring Togetherness)*”, yang diharapkan dapat membangun kebersamaan dan rasa saling memiliki.

Adanya rasa kebersamaan dan rasa saling memiliki, sejalan dengan pandangan Pitana (2008: 74-75), makna pelestarian budaya di dalamnya terkandung konsep adaptasi, revitalisasi, rekonstruksi, reinterpretasi, dan konservasi. Geriya (2008: 35) juga melihat makna pelestarian yang dinamis bisa terjadi karena modal budaya itu sebagai satu sistem dan satu proses. Sebagai satu sistem, kebudayaan itu membangun struktur dan juga hubungan-hubungan fungsional dalam menjaga equilibrium serta keharmonisan hubungan antar unsur. Secara alamiah kebudayaan cenderung memiliki potensi untuk memantapkan struktur, keseimbangan, dan harmoni. Karena itu, sebagai satu proses kebudayaan itu dinamik dan berubah yang di dalamnya tercakup fenomena konflik, benturan, paradoks, dialektika, dan sintesa. Yang berkembang dalam makna pelestarian budaya di Desa Adat Kuta adalah fenomena dialektika dan sintesa, seperti terlihat dalam *event Kuta Karnival, Pasar Majalangu, atau Ngelawang*.

Menurut I Gusti Ketut Sudira dan I Made Wendra, dalam kegiatan *Pasar Majalangu* yang berlangsung sehari setelah *Nyepi* atau bertepatan dengan hari *Ngembak Geni*, pada zaman dulu sebelum pariwisata berkembang, hanya masyarakat lokal yang berjualan berbagai jenis makanan dan minuman, serta diselingi dengan acara *tajen* (sabungan ayam) untuk menghibur diri. Namun sejak pariwisata berkembang, perubahan terjadi dalam kegiatan *Pasar Majalangu*, dimana banyak pedagang luar daerah ikut berjualan menawarkan berbagai jenis makanan dan barang keperluan sehari-hari. Ideologi pasar kapitalis telah bergerak cepat memasuki tradisi *Pasar Majalangu*.

Selama sehari Pantai Kuta berubah menjadi pusat transaksi komoditi yang diperlukan masyarakat dan wisatawan yang sedang berlibur di Kuta. Para pedagang hanya membayar iuran

yang jumlahnya berkisar antara Rp. 50.000,- sampai Rp.300.000,- tergantung besar kecilnya areal yang dipakai untuk menjajakan barang dagangan. Kios sovenir, toko-toko, dan warung makan yang berada di wilayah Desa Adat Kuta ditutup selama *Pasar Majalangu* berlangsung, kecuali restoran dan hotel yang sedang melayani wisatawan. Lebih jauh I Gusti Ketut Sudira dan I Made Wendra menjelaskan tentang pelestarian *Pasar Majalangu* (Wawancara tanggal 18 April 2009) sebagai berikut.

“Pasar Majalangu merupakan tradisi khas Desa Adat Kuta untuk memeriahkan hari *Ngembak Geni* sehari setelah *Nyepi*. Pada zaman dulu hanya orang-orang dari Desa Adat Kuta yang berjualan makanan dan minuman, kadang-kadang juga diisi acara *tajen* untuk menghibur diri. Akan tetapi sejak pariwisata berkembang tahun 1970-an sampai sekarang, banyak pendatang luar daerah ikut berjualan berbagai jenis barang, dari peralatan rumah tangga, baju kaos sampai souvenir untuk wisatawan. Orang lokal atau *krama* Desa Adat Kuta hampir tidak ada yang ikut berjualan, mereka datang ke pantai hanya untuk berbelanja dan menghibur diri. Untuk menghibur pengunjung pada malam hari, biasanya dipentaskan berbagai kesenian tradisional dan musik dangdut. Setiap pedagang dikenakan iuran sebagai sewa tempat berjualan, sehingga ini juga menjadi sumber pendapatan Desa Adat Kuta. Kami tetap melestarikan budaya *Pasar Majalangu* dalam bentuknya yang telah menyesuaikan dengan perkembangan Desa Adat Kuta sebagai daerah pariwisata. Acara *tajen* kami larang, karena memang *tajen* sebagai bentuk perjudian telah dilarang oleh pemerintah. Sebagai gantinya, kami mengadakan acara hiburan dengan menampilkan penari dan artis penyanyi lokal serta nasional. Seluruh rangkaian kegiatan *Pasar Majalangu* ini sekaligus kami manfaatkan sebagai daya tarik wisata yang berlangsung setahun sekali”.

Berbeda dengan *Pasar Majalangu*, pelestarian modal budaya berupa aktivitas *Ngelawang* atau melakukan pertunjukan *barong* keliling desa yang dilakukan oleh *sekeha teruna* (organisasi pemuda) dari Banjar Temacun saat

tengah malam setelah selesai pawai *ogoh-ogoh* atau pada hari raya *Galungan* dan *Kuningan*, lebih bersifat menyalurkan bakat seni dan penanaman rasa cinta anak muda terhadap kebudayaannya. Seperti diakui oleh anggota *sekeha teruna* Banjar Temacun, I Kadek Suastika dan Putu Rudi Hartawan serta pembina bidang kesenian, Anak Agung Raka Bawa (wawancara, 6 Juli 2008), kegiatan *Ngelawang* yang dilakukannya sebagai wujud pelestarian budaya yang diwariskan oleh leluhurnya, sehingga mereka tidak menerima upah atau bayaran berupa uang kepada wisatawan dan orang-orang yang menonton atraksi pertunjukannya di sepanjang jalan.

Para pemuda menyebut aktivitas berkesenian mereka itu dengan istilah "*medemen-demen*", atau untuk bersenang-senang dan menyenangkan orang lain. Karena itu, *barang* yang diusung dan dipentaskan bukan merupakan *barang sesubunan* yang disakralkan, melainkan *barang* yang dibuat khusus untuk *Ngelawang*, bersenang-senang. Karena bersifat untuk bersenang-senang dan menunjukkan identitas budaya kepada wisatawan, maka aktivitas ini sering dilaksanakan secara spontanitas dan biaya makan serta minum ditanggung secara pribadi.

Bendesa Adat Kuta, I Gusti Ketut Sudira, sangat mendukung aktivitas *Ngelawang* para pemuda ini, karena dinilai sangat penting dalam upaya menjaga identitas budaya Desa Adat Kuta dalam pengembangan pariwisata. Termasuk para pemuda dari luar Desa Adat Kuta yang melakukan aktivitas *Ngelawang* di wilayah desa adatnya, juga disambut gembira dan diberi kebebasan melakukan atraksi seni. Mereka diharapkan tidak mengganggu ketertiban umum, menjaga keamanan dan kenyamanan Desa Adat Kuta sebagai daerah wisata. Kehadiran kegiatan *Ngelawang* para pemuda dari luar Desa Adat Kuta ini sekaligus dianggap sebagai atraksi wisata yang menarik bagi wisatawan.

Menurut I Wayan Paramarta, seorang pemuda anggota kelompok *Ngelawang* dari Denpasar (wawancara, 2 April 2009), kegiatan ini dilakukan hanya pada hari raya *Galungan* untuk

menghibur masyarakat dan wisatawan di Kuta. Masyarakat atau wisatawan yang tertarik dan merasa puas melihat atraksi pertunjukkan *barang* ini di jalanan atau di depan restoran, akan memberikan uang secara sukarela yang besarnya bervariasi, dari Rp.10.000,00 sampai dengan Rp. 50.000,00. Sehari *Ngelawang* bisa mendapat uang sekitar Rp.1.000.000,00 sampai dengan Rp.1.500.000,00. Uang ini sebagian disisihkan untuk kas kelompok, sedangkan sisanya dibagi secara merata di antara anggota kelompok yang berjumlah 10 orang. Kegiatan *Ngelawang* tersebut seperti tampak pada gambar 51 sebagai berikut.

Selain mendukung kegiatan *Ngelawang*, dalam memeriahkan hari raya *Galungan* dan *Kuningan*, Desa Adat Kuta juga melaksanakan lomba *Penjor* yang dipusatkan di depan *Pura Desa*. Lomba yang memperebutkan Piala Bergilir Bendesa Adat Kuta ini, diikuti oleh para *sekeha teruna* dari 13 *banjar* di lingkungan Desa Adat Kuta. Menurut Bendesa Adat Kuta, I Gusti Ketut Sudira, dan Ketua Panitia Lomba, Anak Agung Raka Bawa, lomba ini dimaksudkan membina generasi muda dalam melestarikan modal budayanya, di samping sebagai kegiatan yang bisa menjadi daya tarik wisata. Karena bersifat pembinaan dan promosi pariwisata, maka setiap peserta diberi bantuan uang sebesar Rp.1.000.000,00 yang dapat digunakan untuk membeli sarana perlengkapan membuat *Penjor*.

Lomba *Penjor* yang pertama kali dilaksanakan bertepatan dengan hari raya *Galungan*, tanggal 20 Agustus 2008 tersebut, diikuti dengan penuh semangat oleh para *sekeha teruna* yang persiapan sarannya telah dilakukan sejak dua minggu sebelum lomba diadakan. Untuk sebuah *Penjor* bisa menghabiskan biaya sekitar Rp.2.000.000,00 sampai dengan Rp. 3.500.000,00 sesuai dengan keunikan bentuk sarana dan ornamen hiasan yang digunakan, seperti patung garuda, patung naga, jamur diberi warna, dan padi Bali.

Penjor yang dilombakan ini dipajang di pinggir jalan depan *Pura Desa*, tampak megah dan sangat artistik sehingga menarik perhatian para

wisatawan serta orang-orang yang lewat. Bentuk dan keindahan *Penjor* yang dilombakan ini ternyata jauh lebih menarik dibanding *Penjor* yang dibuat oleh *krama* Desa Adat Kuta sebagai pelengkap sarana upacara hari raya Galungan dan Kuningan. Yang berhasil merebut juara satu dan berhak mendapatkan Piala Bergilir Bendesa Adat Kuta adalah *Sekeha Teruna* Banjar Anyar, juara diraih oleh *Sekeha Teruna* Banjar Temacun, dan juara tiga direbut oleh *Sekeha Teruna* Banjar Pering. Hadiahnya langsung diserahkan oleh Bendesa Adat Kuta bersama Lurah dan Camat Kuta. Suasana lomba *penjor* dalam rangka hari raya Galungan dan Kuningan serta Bendesa Adat Kuta menyerahkan Piala Bergilir.

Selain berbagai bentuk praktik budaya tersebut, kaum perempuan Desa Adat Kuta yang tergabung dalam wadah PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) Kelurahan Kuta ikut melakukan aktivitas pelestarian budaya dengan membentuk *Sekeha Gong Kebyar* Wanita "Pertwi Wijaya Kesuma" Desa Adat Kuta yang dipimpin oleh Ni Luh Gede Sri Mediasuti dari Banjar Segara.

Kaum perempuan Desa Adat Kuta yang saban hari sibuk dengan aktivitas pariwisata, ternyata mereka tidak kehilangan talenta estetis. Di tengah kerja keras merebut peluang bisnis pariwisata dan sebagai ibu rumah tangga, mereka masih menyempatkan diri mengasah talenta seni *gong kebyar*, tidak kalah dengan kaum laki-laki. Hasilnya, mereka pernah tampil mempesona dan mendapat sambutan hangat penonton yang memadati Panggung Ardha Candra, Taman Budaya, Art Centre, pada tanggal 2 Juli, 2008. Menurut Ni Luh Gede Mediasuti dan pembina seni, I Wayan Kaler Aryasa dan Ni Wayan Suastini, keberhasilan tersebut berkat berlatih keras setiap malam.

Pelestarian modal budaya di bidang arsitektur, juga tampak pada *krama* Desa Adat Kuta saat ini semakin banyak yang mendekonstruksi bangunan rumahnya dengan penambahan gaya arsitektur Bali. Penambahan unsur hiasan berupa ornamen ukiran Bali dan sentuhan warna *peraka* pada ornamen ukiran itu,

bisa menunjukkan rasa bangga pemiliknya karena berhasil melestarikan budayanya di mata para wisatawan yang berkunjung ke Desa Adat Kuta. Khusus bagi yang memanfaatkan sebagian rumahnya untuk *home stay* atau disewakan kepada wisatawan, gaya arsitektur Bali itu bisa menjadi daya tarik wisata.

Menurut I Ketut Supatra dan I Nyoman Mender (wawancara, 2 Januari 2009), para wisatawan yang menginap di rumah dengan arsitektur Bali itu diharapkan dapat merasakan sisi yang damai di tengah hiruk pikuk aktivitas wisata di ruang publik yang menyatu dengan aktivitas sosial masyarakat lokal. Para wisatawan seperti diajak bermotagita tinggal di rumah keluarga bangsawan Bali zaman dulu, karena hanya para bangsawan dan para raja yang memiliki rumah dengan arsitektur seperti itu pada zaman dulu. Para wisatawan yang merasa puas menginap di rumah itu, tentu tidak keberatan membayar sewa lebih mahal, walaupun tidak semahal sewa kamar di hotel berbintang.

Biasanya yang memilih tinggal di *home stay* milik penduduk lokal ini merupakan wisatawan yang telah sering mengunjungi Kuta. Mereka seperti ketagihan datang ke Kuta, selain ingin menikmati keindahan pantai, juga ingin merasakan kehangatan tinggal di tengah-tengah penduduk lokal. Rumah penduduk dengan arsitektur Bali yang menarik bagi wisatawan dan dijadikan *home stay*, seperti tampak pada gambar 53 sebagai berikut.

Perjuangan politik identitas menjaga keberlanjutan budaya dan Desa Adat Kuta dalam di tengah berkembangnya pariwisata, sejalan dengan pendapat Giddens (2001: 8), bahwa globalisasi menjadi alasan bagi kebangkitan kembali identitas budaya lokal di berbagai belahan dunia. Jika orang bertanya, misalnya, mengapa orang-orang Skotlandia menginginkan kemerdekaan yang lebih besar di Kerajaan Inggris, atau mengapa ada gerakan separatist yang kuat di Quebec, jawabannya tidak akan ditemukan hanya dalam sejarah kebudayaan mereka. Nasionalisme lokal merujuk sebagai respon terhadap kecenderungan globalisasi, seiring dengan

melemahnya negara-bangsa lama. Lebih jauh Giddien menjelaskan sebagai berikut.

Sungguh rasional mengakui bahwa tradisi dibutuhkan dalam masyarakat. Kita tidak boleh menerima gagasan Abad Pencerahan bahwa dunia harus membersihkan diri dari tradisi. Tradisi dibutuhkan dan akan selalu bertahan, karena menciptakan kesinambungan dan memberi bentuk pada kehidupan. Tradisi dapat dipertahankan dengan baik melalui cara yang tidak tradisional—dan hal itu akan menjadi masa depannya. (Giddien, 2001:42)

Ungkapan Giddien di atas sejalan dengan pendapat Piliang (2004: 325), menunjukkan bahwa kapitalisme global menawarkan sebuah ruang, di mana hasrat mengalir dengan bebas, bersamaan dengan mengalirnya kapital dan komoditi. Lebih jauh Piliang menguraikan sebagai berikut.

"Kapitalisme adalah sebuah ruang yang di dalamnya terjadi perputaran hasrat yang tanpa henti dan tanpa interupsi. Kapitalisme hidup dari gejolak hasrat yang tak bertepi itu. Lewat mesin hasratnya yang berputar-putar tanpa henti, kapitalisme memasuk ke dalam jagadnya kolektif, dan di sana ia menegakkan norma, menciptakan jaringan semiotik (gaya hidup) dan mencetak karakter manusia konsumen. Dunia konsumerisme menjadi sebuah ruang sosial, di mana para konsumen dikonstruksi kehidupan sosialnya sehingga ia mengikuti arus hasrat yang mengalir".

Geriya (2008: 34 dan 149) juga melihat keterkaitan budaya tradisional dengan modernisasi, di mana budaya tradisional selalu terkait dengan proses perubahan ekonomi, sosial, dan politik dari masyarakat setempat. Budaya tradisional dapat berperan positif untuk mendorong laju modernisasi. Dengan kemampuan adaptif, budaya tradisional memiliki ciri yang dinamis, selalu mengalami perubahan sesuai dengan kekuatan dan tantangan internal maupun eksternal, sehingga menjadi tumpuan untuk kreativitas dan inovasi. Oleh karena itu, kebudayaan Bali misalnya, merupakan satu sosok kebudayaan yang hidup, tumbuh, dan terus berkembang.

Bendesa Adat Kuta, I Gusti Ketut Sudira, dan mantan Bendesa Adat Kuta, I Made Wendri,

tampak jeli membangun wacana politik identitas modal budaya desa adatnya dalam perkembangan pariwisata global. Tantangan ideologi pasar kapitalis dalam pariwisata yang sifatnya dapat mengancam ketahanan modal budaya, secara cepat diantisipasi dengan melakukan langkah inovatif yang dinamis. Dalam kepemimpinannya, secara politis, Bendesa Adat Kuta telah memberikan kebijakan politik yang memungkinkan terjaga identitas budaya, desa adat, dan Agama Hindu hidup dan tumbuh dengan baik. Modal budaya diberdayakan agar berfungsi positif bagi keberlanjutan identitas Desa Adat Kuta dalam pengembangan pariwisata.

III. SIMPULAN

Keberadaan budaya, *desa pakraman*, dan Agama Hindu di Bali tidak bisa dilepaskan satu sama lain. Terlebih-lebih jika dikaitkan dengan Bali sebagai destinasi pariwisata yang tetap mengembangkan pariwisata budaya, maka arah kebijakan pembangunan di bidang politik harus berpihak kepada upaya-upaya mempertahankan budaya, *desa pakraman*, dan Agama Hindu di Bali.

Arah kebijakan pembangunan di bidang politik harus berpihak kepada upaya-upaya mempertahankan budaya, *desa pakraman*, dan Agama Hindu di Bali. Jika tiga pilar utama penyangga identitas Bali ini tidak mendapat kebijakan politik, maka secara perlahan budaya, *desa pakraman*, dan Agama Hindu di Bali memasuki jurang kehancuran. Fenomena-fenomena ke arah kehancuran itu saat ini sudah mulai tampak di Bali yang bisa dilihat dari semakin banyak para pendatang luar Bali tinggal di pedesaan wilayah *desa pakraman* baik sebagai pedagang, buruh bangunan, atau sebagai penghuni kavling perumahan baru. Implementasi falsafah *Tri Hita Karana* yang menjadi landasan *desa pakraman* di Bali mulai semakin jauh dari harapan, sehingga pola hidup dan gaya hidup *krama desa pakraman* di Bali semakin boryak yang tidak sejalan dengan budaya dan tuntunan moral Agama Hindu Bali.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Irwan. 2006. *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Ardika, I Wayan. 2001. "Pariwisata dan Pelestarian Warisan Budaya." Naskah Lengkap Matrikulasi Program Studi Magister Kajian Pariwisata Universitas Udayana. Denpasar 10 - 23 Agustus.
- Ardika, I Wayan. 2003. "Komponen Budaya Bali sebagai Daya Tarik Wisata." I Wayan Ardika (penyunting). *Pariwisata Budaya Berkelanjutan, Refleksi dan Harapan di Tengah Perkembangan Global*. Denpasar: Program Studi Magister (S2) Kajian Pariwisata Universitas Udayana.
- Ardika, I Wayan. 2007. *Pusaka Budaya dan Pariwisata*, Denpasar: Pustaka Larasan
- Ardika, I Wayan. 2007, "Strategi Pengembangan SDM Pariwisata Dalam Era Kompetisi", naskah lengkap makalah Seminar Nasional Universitas Udayana, Denpasar, 16 Juni
- Barker, Chris. 2005. *Cultural Studies, Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Bentang
- Borley, L. 1996. "Heritage and Environment Management: The International Perspectives". Wiendu Nuryanti (editor) *Tourism And Culture Global Civilization In Change*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada
- Capra, Fritjof. 2004. *Titik Balik Peradaban*. (Terjemahan Thoyibi). Yogyakarta: Bentang
- Dayakisni, Tri dan Salis Yuniardi. 2004. *Psikologi Lintas Budaya*, Malang: Universitas Muhammadiyah
- Dharmayuda, Suasthawa I Made. 2001. *Desa Adat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Propinsi Bali*. Denpasar: Upada Sastra.
- Dherana, Tjokorda Raka. 1982. *Aspek Sosial Budaya dalam Kepariwisata di Bali*. Denpasar: UP. Visva Vira.
- Gatner, William C. 1996. *Tourism Development, Principles, Processes, and Policies*. Amerika: International Thomson Publishing Company.
- Geriya, I Wayan. 2008. *Transformasi Kebudayaan Bali Memasuki Abad XXI*. Surabaya: Paramita.
- Geriya, I Wayan. 2006. "Implementasi Konsep Pariwisata Budaya untuk Bali dalam Teropong Harmoni dan Paradoks", naskah lengkap makalah Dialog Pariwisata Bali di Universitas Udayana, 10 Oktober
- Geriya, I Wayan.. 1997. "Potensi dan Peranan Kesenian dalam Diplomasi Kebudayaan dan Hubungan Antarbangsa serta Implikasinya Terhadap Pengembangan Kreativitas Seni", artikel dalam MUDRA Jurnal Seni Budaya, No.5 Tahun V, Maret. Denpasar,:STSI.
- Gidden, Anthony. 2001. *Runway World, Bagaimana Globalisasi Merombak Kehidupan Kita*, Jakarta: Gramedia
- Harker, Richard, Cheelen Mahar, Chris Wilkes. 2006. *(Habitus X Modal) + Ranah = Praktik, Pengantar Paling Komprehensif kepada Pemikiran Pierre Bourdieu*, terjemahan Pipit Maizier. Yogyakarta: Jalasutra
- Jennings, Gayle. 2001. *Tourism Research*. Australia: Central Queensland University
- Jenkins, Richard. 2004. *Membaca Pikiran Pierre Bourdieu*. (terjemahan Nurhadi). Yogyakarta: Kreasi Wacana
- Karyono, A. Hari. 1997. *Kepariwisataaan*. Jakarta: Grasindo
- Lubis, Akhyar Yusuf. 2004. *Masih Adakah Tempat Berpijak Bagi Ilmuwan*, Bogor, Akademia
- Lubis, Nur A. Fadhil. 2006. "Agama Sebagai Poros Perubahan". Teuku Kemal Fasya (Editor) *Kata & Luka Kebudayaan*. Medan: USU Press
- MacRae, Graeme S. 1999. "Economy, Ritual And History In A Balinese Tourist Town", (Disertasi) Auckland: University of Auckland in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy.
- Mulder, Niels. 1999. *Agama, Hidup Sehari-Hari dan Perubahan Budaya*. Jakarta, Gramedia

- Mc. Kean, Philip Frick.1973. "Analisa pendahuluan tentang Interaksi orang bali dengan Wisatawan: Tradisi Kecil, Besar, dan Modern dari Suatu Kebudayaan". I Gusti Ngurah Bagus (Editor) *Bali Dalam Sentuhan Pariwisata*. Denpasar: I Gusti Ngurah Bagus untuk DE. Brown.
- Pendit, Nyoman S. 1996. *Hindu Dharma Abad XXI Menatap Masa Depan Peradaban Umat Manusia*. Denpasar: Yayasan Dharma Naradha
- Picard, Michel. 2006. *Bali Pariwisata Budaya dan Budaya Pariwisata*, terjemahan Jean Couteau dan Warih Wisatsana, Jakarta: Gramedia
- Piliang, Yasraf Amir. 2003. *Hipersemiotika, Tafsir Cultural Studies Atas Matinya Makna*, Yogyakarta: Jalasutra
- Piliang, Yasraf Amir. 2004. *Posrealitas, Realitas Kebudayaan dalam Era Posmetafisika*. Yogyakarta: Jalasutra
- Pitana, I Gde. 1998. "Tourisfikasi, Internasionalisasi, dan Indegenisasi: Pembangunan Bali menyongsong Milenium Ketiga dan Era Reformasi Total". Naskah lengkap Orasi Ilmiah Dies Natalis ke-36 Universitas Udayana. Denpasar 29 September.
- Pitana, I Gde, I Nyoman Sirtha, AA. Gde Putra Agung, Ni Wayan Sri Astiti, Ni Wayan Putu Artini, Nyoman Sunarta. 1999/2000. "Perencanaan Sosial Di Kawasan Pariwisata Kuta", Denpasar: Kerjasama Bappeda Kabupaten Badung dengan Pusat Penelitian Kebudayaan dan Kepariwisata Universitas Udayana.
- Ritzer, George, Douglas J. Goodman. 2007. *Teori Sosiologi Modern*. Terjemahan Alimandan. Jakarta: Kencana Prenanda Media Group.
- Strinati, Dominic. 2003. *Popular Culture, Pengantar Menuju Teori Budaya Populer*. Terjemahan Abdul Mukhid. Yogyakarta: Bintang Budaya
- Tantri, K'tut. 1965. *Revolusi di Nusa Damai*. Jakarta: Gunung Agung
- Tilaar, H.A.R. 2005. *Manifesto Pendidikan Nasional, Tinjauan Dari Perspektif Postmodernisme dan Studi Kultural*, Jakarta: Kompas.
- Tilaar, H.A.R.2003. *Kekuasaan & Pendidikan, Tinjauan Dari Perspektif Postmodernisme dan Studi Kultural*, Magelang: Indonesia Tera
- Turner, Bryan S, 2006. *Agama dan Teori Sosial*. Yogyakarta: IRCiSoD